

ABSTRAK

Michael William (01021170017)

ANALISIS PERBANDINGAN STANDAR KONTRAK ANTARA FIDIC DENGAN UU NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI MENGENAI KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PROYEK

Skripsi, Fakultas Sains dan Teknologi (2021).

(xiv + 56 halaman; 4 gambar; 20 tabel)

Proyek konstruksi merupakan rangkaian pekerjaan yang kompleks dan melibatkan banyak pihak, sehingga dibutuhkan perjanjian dalam bentuk kontrak konstruksi yang menentukan hak dan kewajiban para pihak untuk menghindari adanya perbedaan pandangan yang dapat menyebabkan sengketa konstruksi. Berdasarkan data Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), sengketa konstruksi mendominasi 30,8 persen dari total kasus yang ditangani BANI. Masalah yang paling sering dipersengketakan adalah keterlambatan waktu pelaksanaan proyek yang disebabkan oleh pemilik tidak memenuhi kewajibannya, kelalaian kontraktor dan faktor eksternal. Di Indonesia, walaupun UUK merupakan dasar hukum tentang jasa konstruksi, tetapi masih ada peraturan lain yang mengatur tentang konstruksi seperti Peraturan Presiden, Peraturan Gubernur, Peraturan Daerah, sehingga dapat disimpulkan bahwa Indonesia belum memiliki satu standar baku tentang konstruksi. Selain itu, UUK dan peraturan pelaksanaannya belum menjelaskan ketentuan mengenai keterlambatan waktu pelaksanaannya dengan jelas dan spesifik. Sedangkan pada dunia konstruksi internasional, telah lama dikenal standar FIDIC yang merupakan standar kontrak konstruksi yang bertujuan untuk menciptakan standar kontrak dimana pembagian risiko antara pihak dapat seimbang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan dokumen FIDIC dengan UUK dalam hal keterlambatan waktu pelaksanaan proyek dan mengetahui apakah dokumen FIDIC dapat diterapkan tanpa bertentangan dengan UUK. Dalam penelitian ini digunakan metode komparatif dengan cara membuat tabel perbandingan untuk membandingkan kedua standar pada aspek keterlambatan pelaksanaan, sistem pembayaran, tanggung jawab kontraktor, dan peristiwa luar biasa. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa ada banyak persamaan antara kedua standar, namun pada UUK belum menjelaskan hal/langkah yang spesifik mengenai aspek-aspek yang dibandingkan. Selain itu, tidak ditemukan pertentangan antara kedua standar yang menjelaskan bahwa dokumen FIDIC dapat diterapkan di Indonesia untuk empat aspek yang dibahas.

Kata Kunci: FIDIC, UUK, Konstruksi, Sengketa, Undang-Undang

Referensi: 23 (1995-2020)

ABSTRACT

Michael William (01021170017)

COMPARATIVE ANALYSIS OF CONTRACT STANDARDS BETWEEN FIDIC AND CONSTITUTION OF INDONESIA NO. 2 OF 2017 ABOUT CONSTRUCTION SERVICES REGARDING DELAY IN PROJECT IMPLEMENTATION TIME

Thesis, Faculty of Science and Technology (2021).

(xiv + 56 pages; 4 figures; 20 tables)

Construction project is a complex series of work and involves many parties, so an agreement in the form of a contract is needed to determine the rights and obligations of the parties to prevent differences of point of view that can lead to construction disputes. Based on data from the Indonesian National Arbitration Agency (BANI), construction disputes dominate 30.8 percent of the total cases handled by BANI. The most frequently disputed problem is the delay in project implementation time caused by the owner not fulfilling his obligations, contractor negligence and external factors. In Indonesia, although UUJK is the legal basis for construction services, there are still other regulations governing construction such as Presidential Regulations, Governor Regulations, Regional Regulations, so it can be concluded that Indonesia does not yet have a single standard on construction. In addition, UUJK and its implementing regulations have not clearly and specifically explained the provisions regarding delays in implementation. Meanwhile, in the international construction world, FIDIC standard has been known for a long time, which is a construction contract standard that aims to create a standard contract in which the risk sharing between parties can be balanced. The purpose of this study is to determine the difference between FIDIC and UUJK in terms of delay in project implementation time and to find out whether FIDIC documents can be applied without conflicting with UUJK. In this study, a comparative method was used by making a comparison table to compare two standards on aspects of delay in implementation, payment systems, contractor's responsibility, and external factors. The results of this study explain that there are many similarities between the two standards, but UUJK has not explained specific things/steps regarding the aspects being compared. In addition, there is no conflict between the two standards which explains that the FIDIC document can be applied in Indonesia for the four aspects discussed.

Keywords: FIDIC, UUJK, Construction, Dispute, Constitution of Indonesia

Reference: 23 (1995-2020)